

Receive : 27 November 2023  
Revised : 29 November 2023  
Accepted : 30 November 2023

Jurnal ADMINISTRATOR  
P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76  
Vol. 5 No. 2, Desember 2023, Hlm. 174-180



## Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

\*Filo Leonardo Tinggogoy<sup>1</sup>, Fachrul Reza<sup>1</sup>

E-Mail : filoleo1983@gmail.com\*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the Development Planning Analysis of Bolapapu Village, Kulawi District, Sigi Regency. The informants in this research were Bolapapu Village officials, Kulawi District, Sigi Regency and village residents. Besides that. This research data consists of primary data and secondary data obtained directly through field research (interviews). Data was analyzed using the results of interviews with officials at the Bolapapu Village office and the community.*

*The results of the research show that the development planning for Bolapapu Village is quite good, which is demonstrated by the commitment and seriousness of the authorities in carrying out their duties and functions in administering the Bolapapu Village government, Kulawi District, Sigi Regency. The theory used by the author is the theory of Taliziduhu Ndraha (2003: 56), namely: The amount of costs, facilities and infrastructure for human resources is clear, the implementation time is clear, when it starts and when it ends, Development is carried out in accordance with community needs. which the author considers more suitable to be applied to village government organizations, in this case the Bolapapu Village office, Kulawi District, Sigi Regency. through observation and direct interviews with five informants from the three dimensions/aspects of development planning assessment. The author concludes that the quality of apparatus development planning at the Bolapapu Village Office, Kulawi District, Sigi Regency, as measured by the three indicators/dimensions, is considered to have fairly good development planning, namely the indicators of total costs, facilities and infrastructure as well as human resources, while in terms of indicators/ The implementation time dimension is clear and development is carried out in accordance with community needs, the results of which still need to be improved*

**Keyword :** Development Planning, Human Resources

Page | 174

*Receive* : 27 November 2023

*Revised* : 29 November 2023

*Accepted* : 30 November 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76

## LATAR BELAKANG

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.. Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan adanya sistem ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di dalam sistem Desentralistik dan Otonomi Daerah, melekat pula kewenangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk secara proaktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan demi kesejahteraan Rakyat. Tanggung jawab ini merupakan konsekwensi logis dari salah satu tujuan diberlakukannya Otonomi Daerah.

Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good

*Receive* : 27 November 2023

*Revised* : 29 November 2023

*Accepted* : 30 November 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76

Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang Desentralistik dan Demokratis khususnya di Kabupaten Sigi.

Kesuksesan pembangunan kabupaten/ kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakkan pembangunan ditingkat desa, karena Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi merupakan bagian wilayah administratif di Kecamatan Kulawi yang sedang berkembang pesat pembangunannya. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Bolapapu diperlukan organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar masyarakat Desa Bolapapu mau berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang ada di Desa Bolapapu dapat berjalan secara rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pembangunan desa akan berjalan optimal apabila program yang dibuat bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berupa pendapatan, peningkatan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Maka dari itu perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan peran dari masyarakat memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Desa nya. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu.

Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan Desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang

dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan di Desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka.

Beberapa fenomena yang penulis temukan dilokasi penelitian bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, diantaranya adalah :

1. Dengan banyaknya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa Bolapapu sehingga menyebabkan kesulitan untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan.
3. Pembangunan yang tidak tepat sesuai dengan rencana, baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.

Kontruksi konsep dan teori yang dijadikan sebagai kerangka konseptual/teoritis penelitian dalam alur pikir ini direduksi dari konsep dan teori yang telah dibahas sebelumnya (pada landasan teoritis dan kepustakaan yang relevan), sebagai kerangka acuan di dalam membuat

asumsi-asumsi dan proposisi penelitian.

Menurut Taliziduhu Ndrahah (2003: 56) keberhasilan pembangunan pada masyarakat Desa dapat dilihat dari :

- a) Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
- b) Waktu pelaksananya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
- c) Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu : 1). Kepala Desa Bolapapu; 2). Sekretaris Desa; 3). Kaur Pemerintahan; 4). Ketua RT sebanyak dua orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari informan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah.

Receive : 27 November 2023

Revised : 29 November 2023

Accepted : 30 November 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76

Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara : Melakukan wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menggali masalah dan pemecahnya sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan Badan terkait.
2. Pengamatan : Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap gejala dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian dicatat atau direkam dengan menggunakan alat tulis, taperecorder atau kamera.

Studi Peraturan Perundang-undangan : Dalam studi peraturan perundang- undangan ini penulis mendapat peraturan yang jelas serta berkaitan dengan pokok pembahasan yang coba penulis temukan penyelesaiannya. Analisis data diperlukan dalam suatu penelitian untuk mengolah data yang telah dikumpulkan melalui informan dan data sekunder lainnya. Dalam penelitian ini, analisis

data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008), yaitu : 1). Pengumpulan data; 2). Reduksi data, dan; 3). Penyajian data.

## PEMBAHASAN

### 1. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan / aspirasi yang berkembang.

Hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian memperlihatkan perencanaan pembangunan kami sudah baik dan berjalan lancar dimana telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Itu semua tidak lepas dari peran sumber daya aparatur itu sendiri. Dan ini selalu diterapkan dalam perencanaan pembangunan masing-masing karena merupakan tolak ukur kerja aparatur kami sesuai dengan tugas pokok.

Receive : 27 November 2023

Revised : 29 November 2023

Accepted : 30 November 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76

## **2. Waktu pelaksananya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang diberikan aparatur kami kepada masyarakat jujur saya katakan belum dikatakan baik dan berkualitas masih perlu mendapat perhatian khusus dari aparatur untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan demi mempertahankan citra kantor Desa ini kedepan. Harapan saya semua aparatur dapat bekerja secara baik khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan darikabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. selain diperlukan adanya perencanaan pembangunan Desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi pembangunan,mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Keterbatasan-keterbatasan tertentu yang juga masih banyak dimiliki oleh setiap

desa khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Temuan yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrumilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan.

## **3. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat**

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan dari hasil observasi yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa sebenarnya Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum optimal. menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan aparatur di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat demi tercapainya perencanaan pembangunan yang baik. selalu ada peran serta dari seorang pimpinan guna memberi arahan agar mencapai hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang

Receive : 27 November 2023

Revised : 29 November 2023

Accepted : 30 November 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i2.76

memang berwenang mengurus semua urusan Desa, tetapi tidak lepas dari terlibatnya masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Intinya dari semua tanggapan dapat menghasilkan suatu rencana dan hasil dari pelaksanaan, hal itu tidak lepas dari kekurangan baik pemerintah bahkan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran perencanaan pembangunan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, melalui observasi dan hasil wawancara langsung dengan kelima orang informan dari ketiga dimensi/aspek penilaian perencanaan pembangunan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, yang diukur dari ketiga indikator/dimensi tersebut yang dinilai mempunyai perencanaan pembangunan yang cukup baik adalah indikator Jumlah biaya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, sedangkan dalam indikator/dimensi Waktu pelaksananya jelas dan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya masih perlu ditingkatkan lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Husaini. U. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [2] Moleong. J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [3] Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [5] Sarwoto. (1992). *Bimbingan Karier*. Angkasa. Bandung
- [6] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- [7] Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [8] Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa